

KPU Kota Tebing Tinggi

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2026

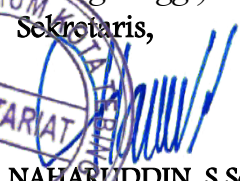
KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Kota Tebing Tinggi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kota Tebing Tinggi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kota Tebing Tinggi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tebing Tinggi, 30 Juni 2026
Sekretaris,

NAHARUDDIN, S.Sos, MM
NIP. 197003051994021001



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49
VI. Lampiran dan Daftar	



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

Jl. Rumah Sakit Umum Nomor 6-8, Kota Tebing Tinggi

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2026

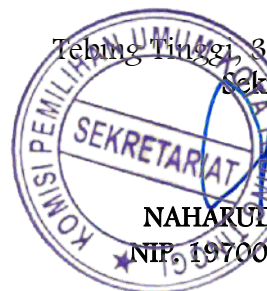
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Semester I Tahun Anggaran 2026 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2026, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akuntansi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Tebing Tinggi, 30 Juni 2026
Sekretaris,

NAHARUDDIN, S.Sos, MM
NIP. 197003051994021001





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

Jl. Rumah Sakit Umum Nomor 6-8, Kota Tebing Tinggi

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tebing Tinggi, 30 Juni 2026
Sekretaris,

NAHARUDDIN, S.Sos, MM
NIP. 197003051994021001



Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Anggaran KPU Kota Tebing Tinggi pada 30 Juni TA 2026 adalah berupa Belanja Pegawai Sebesar Rp. 2.275.158.871,-, Belanja Barang Sebesar Rp. 173.509.733,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,-. Total Realisasi Belanja KPU Kota Tebing Tinggi pada 30 Juni TA 2026 adalah sebesar Rp.2.448.668.604,- atau mencapai 50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.849.203.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026. Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp.360.858.694,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 17.300.002,-, Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 343.558.692,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.188.831.501,- dan Rp 172.027.193,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar

biasa. pos luar biasa. dan surplus/defisit-LO. yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 2.750.566.552,-, sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (2.750.566.552,-). Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp. 0,-, surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa adalah Sebesar Rp. 2.750.566.552,-Rp. (2.750.566.552,-), Pos Luar Biasa adalah sebesar Rp. 0,-, Sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (2.750.566.552,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pelaporan dibandingkan dengan semester sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 adalah sebesar Rp. 473.925.141,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (2.750.566.552,-). kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset dan Koreksi-Koreksi senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.448.668.604,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp. 172.072.193,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode 30 Juni Tahun 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2026		% thd Angg	TA. 2025
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0	53.480.359
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0	53.480.359
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4.343.922.000	2.275.158.871	52	1.599.969.125
Belanja Barang	B.4	505.281.000	173.509.733	34	825.682.341
Belanja Modal	B.5	-	-	0	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
Jumlah Belanja Operasi		4.849.203.000	2.448.668.604	50	2.425.651.466
Pinjaman dan Hibah					
Belanja Barang	B.7	-	-	0	-
Jumlah Belanja Hibah		-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		4.849.203.000	2.448.668.604	50	2.425.651.466

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
NERACA
PER 30 JUNI 2026 dan 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2026	2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	4.800.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	12.500.002	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		17.300.002	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	2.149.613.076	2.149.613.076
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.806.054.384)	(1.672.800.202)
Jumlah Aset Tetap		343.558.692	476.812.874
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		360.858.694	476.812.874
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	4.800.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	181.660.001	2.887.733
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.28	2.371.500	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		188.831.501	2.887.733
JUMLAH KEWAJIBAN		188.831.501	2.887.733
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	172.027.193	473.925.141
JUMLAH EKUITAS		172.027.193	473.925.141
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		360.858.694	476.812.874

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2026	2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		~	18.759
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya			
JUMLAH PENDAPATAN		~	18.759
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.456.818.872	1.747.186.671
Beban Persediaan	D.3	~	~
Beban Barang Jasa	D.4	111.905.598	728.398.003
Beban Pemeliharaan	D.5	46.481.400	10.062.615
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.106.500	188.246.813
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	~	~
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	133.254.182	129.462.682
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	~	~
JUMLAH BEBAN		2.750.566.552	2.803.356.784
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(2.750.566.552)	(2.803.338.025)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		~	53.461.600
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		~	53.461.600
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		~	~
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		~	~
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		~	~
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		~	~
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		~	53.461.600
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		(2.750.566.552)	(2.749.876.425)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.750.566.552)	(2.749.876.425)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		~	~
Beban Perjalanan Dinas		~	~
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		~	~
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.750.566.552)	(2.749.876.425)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	473.925.141	6.533.684.656
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.750.566.552)	(2.749.876.425)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	(5.045.106.117)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUAS	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	(5.045.106.117)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.448.668.604	1.711.604.902
PENGESEHAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUN	E.5	-	5.045.106.117
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS		(301.897.948)	(6.083.377.640)
EKUITAS AKHIR	E.6	172.027.193	450.307.016

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna membentuk pemerintahan yang demokratis.

Dalam rangka menunjang dan membantu Komisi Pemilihan Umum dalam menuju kesuksesan pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Visi-nya yang menunjukkan jati diri dan fungsinya. Adapun visi tersebut, adalah sebagai berikut :

“ Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi.

Sebagai bentuk nyata dari Visi tersebut, ditetapkanlah Misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada Visi akan lebih nyata pada Misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan Misi memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja sebagai berikut :

- Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang Profesional;
- Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.
- Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusus mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
- Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Misi ini disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya lembaga pemilihan umum yang kompeten, kredibel dan memiliki kapabilitas, peningkatan akuntabilitas dan kinerja penyelenggara Pemilihan Umum,

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Komisi Pemilihan Umum dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Komisi Pemilihan Umum menyusun visi misi tersebut berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- Terselenggaranya Pemilu yang mandiri, profesional, berintegritas, jujur dan adil.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi

adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan~ LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan~ LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti

Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian

Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi telah mengadakan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal sampai dengan Revisi Ke-7. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ini mengakibatkan adanya penambahan/pengurangan pagu dan adanya perubahan dan penambahan akun. Perubahan Tersebut adalah sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2026	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN	~	~
- PENDAPATAN JASA		
- PENDAPATAN LAIN LAIN		
BELANJA	4.323.036.000	4.849.203.000
- BELANJA PEGAWAI	3.835.150.000	4.343.922.000
- BELANJA BARANG	487.886.000	505.281.000
- BELANJA BANTUAN SOSIAL	~	~
- BELANJA MODAL	~	~
PINJAMAN DAN HIBAH	~	~
- BELANJA PEGAWAI		
- BELANJA BARANG	~	~
Jumlah	4.323.036.000	4.849.203.000

Realisasi

Pendapatan Rp.0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0,- dikarenakan pada periode ini tidak adanya penjualan Barang Milik Negara ataupun Penjualan Logistik Eks Pemilu/Pemilihan, sehingga Pendapatan pada Per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0,-

Realisasi Belanja

Negara Rp.

2.448.668.604,-

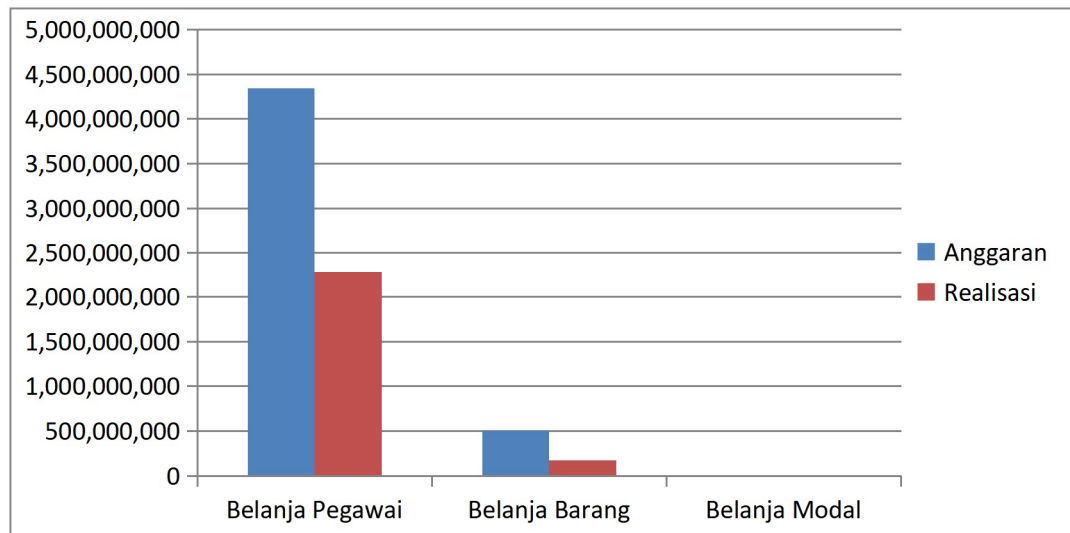
B.2. Belanja

Realisasi Belanja Instansi sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.2.448.668.604,- atau sebesar 50% dari Pagu anggaran belanja sebesar Rp.4.849.203.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan Periode 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
Periode 30 Juni 2026*

URAIAN	TAHUN 2026		% REALISASI ANGGARAN
	ANGGARAN	REALISASI	
BELANJA PEGAWAI	4.343.922.000	2.275.158.871	52,38%
BELANJA BARANG	505.281.000	173.509.733	34,34%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	~	~	
BELANJA MODAL	~	~	
TOTAL BELANJA KOTOR	4.849.203.000	2.448.668.604	50,50%
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI	~	~	
BELANJA BARANG HIBAH	~	~	
Jumlah	4.849.203.000	2.448.668.604	50,50%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2025, Realisasi Belanja Tahun 2026 mengalami kenaikan realisasi belanja. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Adanya Mutasi Pegawai masuk ke KPU Kota Tebing Tinggi dan Pelantikan 7 orang pejabat fungsional sehingga belanja Pegawai per 30 Juni 2026 lebih besar jika dibandingkan dengan belanja pegawai per 30 Juni 2025.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Periode 30 Juni 2026 dan 2025*

URAIAN	REALISASI PER-JUNI 2025	REALISASI PER-JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.275.158.871	1.599.969.125	42,20%
Belanja Barang	173.509.733	825.682.341	-78,99%
Belanja Modal	-	-	0,00%
Belanja Barang Hibah	-	-	
Jumlah	2.448.668.604	2.425.651.466	0,95%

*Belanja Pegawai Rp.
2.275.158.871,-
,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.275.158.871,- dan Rp. 1.599.969.125,-. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2026 mengalami Kenaikan sebesar 42,20% dari T.A. 2025. Hal ini disebabkan oleh, Adanya Mutasi Pegawai masuk ke KPU Kota Tebing Tinggi dan Pelantikan 7 orang pejabat fungsional sehingga belanja Pegawai per 30 Juni 2026 lebih besar jika dibandingkan dengan belanja pegawai per 30 Juni 2025., sehingga meni

Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI TA 2026	REALISASI TA 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	525.479.820	407.334.140	1,059
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.158	4.894	-0,88
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	28.839.928	22.104.386	-0,87
Belanja Tunj. Anak PNS	7.273.308	6.621.762	-0,85
Belanja Tunj. Struktural PNS	27.360.000	27.360.000	~
Belanja Tunj. Fungsional PNS	34.140.000	4.320.000	-0,57
Belanja Tunj. PPh PNS	6.422.177	5.106.425	1,1
Belanja Tunj. Beras PNS	23.608.920	18.322.260	-0,89
Belanja Uang Makan PNS	63.844.000	49.284.000	1,46
Belanja Tunjangan Umum PNS	13.835.000	11.060.000	1,07
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	476.466.900	476.466.900	1
Belanja Gaji Pokok PPPK	259.054.841	98.859.732	5,14
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.860	1.411	100,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7.213.292	5.521.272	100,00
Belanja Tunjangan anak PPPK	2.962.462	1.862.439	100,00

Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	17.010.000	10.620.000	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.000.000	5.853.950	100,00
Belanja Uang Makan PPPK	38.751.000	12.638.000	100,00
Belanja Tunjangan Umum PPPK	11.040.000	2.520.000	100,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	497.679.559	363.150.163	1,02
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PPPK	226.186.171	70.957.655	10,12
Jumlah Belanja Kotor	1.599.969.389	1.599.969.389	1,16
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji	300	264	-0,94
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	3.885.035	~	0
Jumlah Belanja	1.599.669.125	1.599.669.125	1,16

Belanja Barang Rp.
173.509.733,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 173.509.733,- dan Rp. 825.682.341,-. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2026 mengalami Penurunan yang sangat signifikan dibanding Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025. Hal ini antara lain disebabkan tahun 2026, adanya Efisiensi Anggaran, sehingga belanja barang Periode Juni Tahun 2026 lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja barang Periode Juni Tahun 2025.

Perbandingan Belanja Barang Per-Juni 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI TA 2026	REALISASI TA 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	11.800.400	12.138.998	(2,79)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	-
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22.450.000	27.080.000	(17,10)
Belanja Barang Operasional Lainnya	48.174.000	828.000	58,18
Belanja Belanja Bahan	1.743.520	30.544.000	(94,29)
Belanja Honor Output Kegiatan	-	381.100.000	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional - Lainnya	-	122.017.680	(100,00)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Belanja Langganan Listrik	407.671	202.953	2,01
Belanja Langganan Telepon	16.591.542	18.131.282	(8,49)
Belanja Sewa	25.000.000	33.140.000	(24,56)
Belanja Jasa Profesi	-	-	-
Belanja Jasa Lainnya	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.018.400	-	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.784.200	9.662.615	63,35
Belanja Perjalanan Biasa	1.540.000	143.636.813	(98,93)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	47.200.000	(100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
	173.509.733	825.682.341	(78,99)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	173.509.733	825.682.341	(78,99)

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp.0,-*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0,-, sama dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 yakni sebesar sebesar Rp. 0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode Desember 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI PER-JUNI 2026	REALISASI PER JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	

*Belanja Bantuan
Sosial Rp.0,-*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2026 dan Tahun 2025 sama dikarenakan KPU Kota Tebing Tinggi tidak mempunyai realisasi Belanja Bantuan Sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Periode Desember 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A 2025	NAIK (TURUN) %
Jumlah Belanja	0	0	

Belanja Hibah
Rp.0,-

B.7 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Barang Hibah sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Hibah Periode 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A 2025	Naik (Turun) %
Belanja Honor Output Kegiatan	0	0	0%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0%
Belanja Barang Persediaan Barang Lainnya	0	0	0%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.4.800.000-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.800.000,- dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30-Jun-26	31-Dec-25
Bank	2.428.500	-
Kwitansi UP yang belum di SPM kan	2.371.500	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	4.800.000	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	30-Jun-26	31-Dec-25
		-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp.0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas Dana Hibah Pemilihan Walikota yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Kas lainnya dan Setara Kas KPU Tebing Tinggi Per-30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0,- karena di tahun 2026 KPU Kota Tebing Tinggi tidak ada menerima Hibah dari Pemerintah Daerah,

Perbandingan Kas lainnya dan Setara Kas Per-Juni 2026 dan Desember 2025 dapat dirincikan sebagai berikut :

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025*

Uraian	30-Jun-26	31-Dec-25
Kas lainnya dan Setara Kas	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Bukan Pajak
Rp. 0,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNPB per tanggal 30 Juni 2026 dan dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	30-Jun-26	31-Dec-25
Jumlah		

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp. 0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2026 dan dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 06 (Enam) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	30-Jun-26	31-Dec-25
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA
Rp. 0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2026 dan dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 06 (enam) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

Nama	30-Jun-26	31-Dec-25
Jumlah	~	~

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp. 0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per tanggal 30 Juni 2026 dan dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			~
			~
			~
Jumlah			~
Bagian Lancar TP/TGR			
Jumlah			~
Bagian Lancar TPA			
Jumlah			~
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	~		~

C.8 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka
Rp. 12.500.002,-*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2026 dan dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.500.002,- dan Rp. 0,-. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	30-Jun-26	31-Dec-25
Belanja Dibayar Dimuka	12.500.002	
Jumlah	12.500.002	

Saldo Belanja dibayar dimuka merupakan saldo belanja Sewa Gudang KPU Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 sesuai Surat Perjanjian Sewa Nomor : 01.A/PPK/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 sebesar Rp25.000.000, dengan masa sewa selama 12 bulan, terhitung mulai 02 Januari 2026 s.d 31 Desember 2026 sehingga pada 30 Juni 2026 terdapat Belanja Sewa Dibayar Dimuka selama 6 bulan sebesar Rp12.500.002.

*Pendapatan yang
Masih Harus di terima
Rp. 0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus di Terima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2026 dan dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Jenis	30-Jun-26	31-Dec-25
Jumlah		

C.10 Persediaan

*Persediaan
Rp.0,-*

Nilai Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	30-Jun-26	31-Dec-25
Barang Konsumsi	~	~
Persediaan untuk di serahkan kpd masyarakat		
Suku Cadang		
Persediaan Lainnya	~	~
Jumlah	~	~

Tagihan TP/TGR
Rp.0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	30-Jun-26	31-Dec-25
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah		~	~

TPA
Rp.0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	30-Jun-26	31-Dec-25
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah		~	~

*Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp(0)*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Jumlah	~		~
Tagihan PA			
Jumlah	~		~
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	~		~

*Tanah
Rp.0*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2026	
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2026	0

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1			
2			
3			
4			
Jumlah			

Tanah yang terletak di Jl. Rumah Sakit Umum no 5-8, Pasar Baru, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, pada tanggal pelaporan adalah milik Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dengan status pinjam pakai.

*Peralatan dan Mesin
Rp. 2.149.613.076,-*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp. 2.149.613.076,- dan Rp. 2.149.613.076,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2026	2.149.613.076
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2025	2.149.613.076
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-1.806.054.384
Nilai Buku per 30 Juni 2025	343.558.692

*Gedung dan Bangunan
Rp.0.*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2026	
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2026	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	
Nilai Buku per 30 Juni 2026	-

Gedung yang terletak di Jl. Rumah Sakit Umum No. 5-8, Pasar Baru, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berstatus Pinjam Pakai dan pada tanggal pelaporan adalah milik Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2026

Mutasi tambah:
Penambahan jaringan teknologi informasi
Mutasi kurang:

Saldo per 30 Juni 2026

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026

Nilai Buku per 30 Juni 2026

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya
Rp.0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2024. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2026	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku per 30 Juni 2026	0

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp. (1.806.054.384,-)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp.(1.806.054.384,-) dan Rp (1.672.800.202,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (30 Juni 2026)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.149.613.076	1.806.054.384	343.558.692
2	Gedung dan Bangunan			
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
4	Aset Tetap Lainnya			
Jumlah		2.149.613.076	1.806.054.384	343.558.692

Aset Tak Berwujud
Rp.0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada KPU Kota Tebing Tinggi tidak ada. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2026

Mutasi tambah:

Pembelian

Mutasi kurang:

Saldo per 30 Juni 2026

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026

Nilai Buku per 30 Juni 2026

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Jumlah	

Aset Lain-Lain
Rp.0,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2026	~
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi kurang:	-
- Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- Penghapusan BMN	
Saldo per 30 Juni 2026	~
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	-
Nilai Buku per 30 Juni 2026	~

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp. 0,-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Uang Muka dari KPPN
Rp. 4.800.000,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp. 4.800.000,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp. 181.660.001,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp. 181.660.001,- dan Rp.2.887.733,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada KPU Kota Tebing Tinggi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2026

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	181.660.001	Belanja Gaji Induk Pegawai Bulan Juli Tahun 2026
Belanja barang yang masih harus dibayar		
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	
Total	181.660.001	

Utang kepada pihak ketiga Per-30 Juni 2026 merupakan SPM Gaji Induk PNS, PPPK dan Uang Kehormatan Anggota KPU Kota Tebing Tinggi bulan Juli 2026 yang belum terbit SP2D dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SPM No. 00108A sebesar Rp60.296.071,- berupa Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Juli 2026 untuk 14 Pegawai/ 32 Jiwa;
- 2) SPM No. 00109A sebesar Rp22.383.802,- berupa Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Juli 2026 untuk 5 Pegawai/9 Jiwa;
- 3) SPM No. 00110A sebesar Rp6.852.952,- berupa Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2026 untuk 2 Pegawai/4 Jiwa;
- 4) SPM No. 00111A sebesar Rp33.012.176,- berupa Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2026 untuk 10 Pegawai/17 Jiwa;
- 5) SPM No. 00112A sebesar Rp59.115.000 berupa Uang Kehormatan Anggota KPU Kota Tebing Tinggi bulan Juli 2026.

*Pendapatan Diterima
di Muka Rp.0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber

dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan diterima dimuka

Per 30 Juni 2026

Uraian	Jumlah

C.27 Beban yang Masih Harus di Bayar

*Beban yang masih
harus dibayar
Rp. 0,-*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

KETERANGAN	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja barang yang masih harus dibayar	-	-
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	-
Total	-	-

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp. 2.371.500,-*

C.28 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.371.500,- dan Rp. 0,- merupakan Kwitansi yang belum di SPM kan, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

KETERANGAN	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Utang Belanja Keperluan Perkantoran	275.000	0
Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	566.500	0
Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	678.800	0
Utang Belanja Bahan	851.200	0
Total	2.371.500	-

Ekuitas

Rp. 172.027.193,-

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 172.027.193,- dan Rp. 473.925.141,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp. 0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan atas kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 18.759,-. Rincian pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per-30 Juni 2026 dan 2025*

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	18.759	-
Jumlah	-	18.759	-

Beban Pegawai
Rp.
2.456.818.872,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.456.818.872,- dan Rp. 1.747.186.671,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	591.351.960	457.143.040	1,05
Beban Pembulatan Gaji PNS	8.757	5.071	(0,86)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	32.474.184	24.838.376	(0,86)
Beban Tunj. Anak PNS	8.180.544	7.450.368	(0,83)
Beban Tunj. Struktural PNS	30.780.000	30.780.000	~
Beban Tunj. Fungsional PNS	38.880.000	4.860.000	(0,52)
Beban Tunj. PPh PNS	6.453.299	5.123.609	1,09
Beban Tunj. Beras PNS	26.578.140	20.567.280	(0,88)
Beban Uang Makan PNS	63.844.000	39.629.000	1,17)
Beban Tunjangan Umum PNS	11.054.965	12.350.000	1,06
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	535.581.900	535.581.900	1,008
Beban Gaji Pokok PPPK	292.510.141	129.601.932	5,05
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.200	1.756	100,00
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	8.125.322	6.413.142	100,00
Beban Tunj. Anak PPPK	3.339.100	2.233.029	100,00
Beban Tunj. Fungsional PPPK	19.170.000	12780.000	100,00
Beban Tunj. Beras PPPK	13.385.630	7.302.350	100,00
Beban Uang Makan PPPK	38.751.000	12.638.000	100,00
Beban Tunjangan Umum PPPK	12.480.000	~	
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	497679.559	363.150.163	1,02
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PPPK	226.186.171	70.957.655	10,18
Jumlah	2.456.818.872	1.747.186.671	16,28
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	~
Jumlah Belanja	2.456.818.872	1.747.186.671	16,28

*Beban
Persediaan Rp.
0,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Periode 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Persediaan
Per 30 Juni 2026 dan 2025*

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan Bangunan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan Peralatan	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	0	0	-100,00%

*Beban Jasa
Rp.111.905.598,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.111.905.598,- dan Rp. 728.398.003,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Per-30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	12.075.400	12.938.998	-6,67
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	22.450.000	27.080.000	-17,10
Beban Barang Operasional Lainnya	48.174.000	828.000	0,00
Beban Bahan	2.594.720	30.544.000	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	0	381.100.000	-100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	122.017.680	0,00
Beban Langganan Listrik	285.195	154.281	84,85
Beban Langganan Telepon	13.826.285	14.240.046	-2,91
Beban Sewa	12.499.998	139.494.998	-91,04
Beban Jasa Profesi	0	0	0,00
Beban Jasa Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	111.905.598	728.398.003	-84,64

*Beban
Pemeliharaan
Rp. 48.481.400,-*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 48.481.400,- dan Rp 10.062.615,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2026 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.018.400	10.062.615	1,98
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.463.000	0	100,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0,00
Beban Persediaan suku cadang	0	0	0,00
Jumlah	46.481.400	10.062.615	3,62

Beban

*Perjalanan Dinas
Rp. 2.106.500,-*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.106.500,- dan Rp. 188.246.813,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per-30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.106.500	141.046.813	-98,51
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	47.200.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	0,00
Jumlah	2.106.500	188.246.813	-98,88

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada 30 Juni 2026. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode Juni 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk periode Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni 2026 dan
2025*

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pembayaran Sosial	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.133.254.182,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 133.254.182,- dan Rp. 129.462.682,- . Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	133.254.182	129.462.682	2,93
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Penyusutan	133.254.182	129.462.682	2,93
			0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	0,00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	133.254.182	129.462.682	2,93

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp. 0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	0	0	-
Jumlah	0	0	-

*Surplus /Defisit
dari Kegiatan
Non Operasional
Rp 0,-*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Periode 30 Juni 2026 dan 2025 KPU Tebing Tinggi mengalami Surplus pada kegiatan non Operasional yang masing masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 53.461.600,-. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional Per-30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	53.461.600	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	53.461.600	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	53.461.600	-

Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2025 merupakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya didapat Penjualan Persediaan Eks Pemilu 2024 yaitu Rp. 53.461.600,- , sedangkan di tahun 2026 Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 0,-.

*Pos Luar Biasa
Rp.0*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa per-30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBPF	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	0		-
Beban Persediaan	0		-
Jumlah	0	0	-

Pendapatan PNBPF di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana longsor. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp. 473.925.141,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 473.925.141,- dan Rp. 6.533.684.656,-. Ekuitas awal (atau *opening balance equity*) merupakan jumlah kekayaan bersih atau modal awal yang berfungsi sebagai titik tolak penyusunan laporan keuangan baru dan mencerminkan hak pemilik atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban

Defisit LO
(Rp.2.750.566.552,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar (Rp.2.750.566.552,-) dan (Rp.2.749.876.425,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan
Mendasar
Rp.0,-

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Penyesuaian Nilai
Aset
Rp.0,-

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,-

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan Periode 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0,-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp. 0,-

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 0,- dan 0,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain
Rp. 0,-

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. (5.045.106.117,-)-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas

pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

*Rincian Koreksi Lain-lain
Per 30 Juni 2026*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	~
Koreksi Pendapatan	~
Koreksi Piutang	~
Koreksi Kewajiban	~
Koreksi Hibah	~
Jumlah	~

*Transaksi Antar
Entitas
Rp.2.448.668.604,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.2.448.668.604,- dan Rp. 1.711.604.902,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Pengesahan
Pengembalian
Hibah Langsung
Rp .0,-*

E.5 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 5.045.106.117,-, rincian Pengesahan Hibah sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Pengembalian Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Uang	Rp
Total Pengesahan			Rp
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp
Jumlah			Rp

Ekuitas Akhir

Rp. 172.027.193,-

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 172.027.193,- dan Rp. 450.307.016,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Aset Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi telah dibukukan kedalam Aplikasi SAKTI Modul Asset dan tercatat pada Neraca Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi untuk tingkat satker, dimana antara NERACA Pada Aplikasi Sakti Modul Pelaporan telah sama dengan Modul Asset pada Aplikasi SAKTI dan Rekonsiliasi pada Monsakti telah sama.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. Pejabat Pengelola Keuangan

Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada awal Tahun 2026 berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor : 02 TAHUN 2026 Tentang Penunjukkan dan Penetapan Tim Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, tanggal 02 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut :

Satker	Jabatan	Nama
KPU Kota Tebing Tinggi	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	Naharuddin
	Pejabat Pembuat Komitmen	Dian Husri Hurasan
	Pejabat Penanda Tangan SPM	Sri Rahayu
	Bendahara Pengeluaran	Dede Mariaty Hutagalung

2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan selama Tahun Anggaran 2026 antara lain sebagai berikut :

1. Rekening virtual BNI : 9890766560661000 a.n. BPG 124 KPU KOTA TEBING TINGGI untuk keperluan belanja APBN.
2. Rekening Dana Hibah Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2024, pada BPD Sumatera Utara dengan nomor rekening: 30001030002705, a.n. RPL 124 PDHL KPUTT UTK 268VJ62A.

F.2.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, DIPA KPU Kota Tebing Tinggi mengalami 5 (Lima) kali Revisi, dengan Rincian sebagai berikut:

RINCIAN REVISI ANGGARAN PER 30 JUNI 2026

Revisi Ke-	Tanggal DIPA	Jumlah Anggaran	No. Digital Stamp
0	01 Desember 2025	4.323.036.000	DS:9182-6931-6064-0755
1	24 Desember 2025	4.193.537.000	DS:3291-7218-9807-5952
2	06 Februari 2026	4.193.537.000	DS:3291-7218-9807-5952
3	27 Maret 2026	5.004.595.000	DS:0920-5373-4191-7720
4	08 April 2026	5.004.595.000	DS:0920-5373-4191-7720
5	17 April 2026	4.849.203.000	DS:4802-3892-5457-7991

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (656066) KPU KOTA TEBING TINGGI

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM
 Tgl Cetak : 21/07/26 9:18 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	18,759	(18,759)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	18,759	(18,759)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	18,759	(18,759)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,456,818,872	1,747,186,671	709,632,201	40.616
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	111,905,598	728,398,003	(616,492,405)	(84.637)
Beban Pemeliharaan	46,481,400	10,062,615	36,418,785	361.922
Beban Perjalanan Dinas	2,106,500	188,246,813	(186,140,313)	(98.881)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (656066) KPU KOTA TEBING TINGGI

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 9:18 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	133,254,182	129,462,682	3,791,500	2.929
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,750,566,552	2,803,356,784	(52,790,232)	(1.883)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,750,566,552)	(2,803,338,025)	52,771,473	(1.882)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	53,461,600	(53,461,600)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	53,461,600	(53,461,600)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	53,461,600	(53,461,600)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,750,566,552)	(2,749,876,425)	(690,127)	0.025
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,750,566,552)	(2,749,876,425)	(690,127)	0.025

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (656066) KPU KOTA TEBING TINGGI

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 9:18 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	473,925,141	6,533,684,656	(6,059,759,515)	(92.75)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,750,566,552)	(2,749,876,425)	(690,127)	0.03
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(5,045,106,117)	5,045,106,117	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	(5,045,106,117)	5,045,106,117	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,448,668,604	1,711,604,902	737,063,702	43.06
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(301,897,948)	(6,083,377,640)	5,781,479,692	(95.04)
EKUITAS AKHIR	172,027,193	450,307,016	(278,279,823)	(61.8)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

TEBING TINGGI, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



NAHARUDDIN, S.SOS, MM

NIP 197003051994021001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 656066
JENIS SATUAN KERJA : KD

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUMATERA UTARA
KPU KOTA TEBING TINGGI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/26 9:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/7/26 6:51 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	702,143,000	1,287,677,000	525,479,820	0	525,479,820	40.81	762,197,180
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	84,000	84,000	8,158	300	7,858	9.35	76,142
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	56,000,000	56,000,000	28,839,928	0	28,839,928	51.5	27,160,072
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	23,800,000	23,800,000	7,273,308	0	7,273,308	30.56	16,526,692
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	48,300,000	48,300,000	27,360,000	0	27,360,000	56.65	20,940,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,560,000	98,798,000	34,140,000	0	34,140,000	34.56	64,658,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,900,000	4,900,000	6,422,177	0	6,422,177	131.06	(1,522,177)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	42,000,000	42,000,000	23,608,920	0	23,608,920	56.21	18,391,080
511129	Belanja Uang Makan PNS	126,000,000	126,000,000	63,844,000	0	63,844,000	50.67	62,156,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	28,420,000	28,420,000	13,835,000	3,885,035	9,949,965	35.01	18,470,035
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,039,207,000	1,715,979,000	730,811,311	3,885,335	726,925,976	42.36	989,053,024
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	827,610,000	827,610,000	476,466,900	0	476,466,900	57.57	351,143,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	827,610,000	827,610,000	476,466,900	0	476,466,900	57.57	351,143,100
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	420,000,000	420,000,000	259,054,841	0	259,054,841	61.68	160,945,159
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	3,000	3,860	0	3,860	128.67	(860)
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	49,000,000	49,000,000	7,213,292	0	7,213,292	14.72	41,786,708
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	7,700,000	7,700,000	2,962,462	0	2,962,462	38.47	4,737,538
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	67,200,000	67,200,000	17,010,000	0	17,010,000	25.31	50,190,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12,600,000	12,600,000	11,864,810	0	11,864,810	94.17	735,190
511628	Belanja Uang Makan PPPK	70,000,000	70,000,000	38,751,000	0	38,751,000	55.36	31,249,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	25,830,000	25,830,000	11,040,000	0	11,040,000	42.74	14,790,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	652,333,000	652,333,000	347,900,265	0	347,900,265	53.33	304,432,735
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	84,000,000	0	0	0	0		0
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	84,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	168,000,000	0	0	0	0		0
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	686,000,000	686,000,000	497,679,559	0	497,679,559	72.55	188,320,441
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	462,000,000	462,000,000	226,186,171	0	226,186,171	48.96	235,813,829
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,148,000,000	1,148,000,000	723,865,730	0	723,865,730	63.05	424,134,270

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 656066
JENIS SATUAN KERJA : KD

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUMATERA UTARA
KPU KOTA TEBING TINGGI

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/26 9:23 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/7/26 6:51 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,835,150,000	4,343,922,000	2,279,044,206	3,885,335	2,275,158,871	52.38	2,068,763,129
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	33,000,000	33,000,000	11,800,400	0	11,800,400	35.76	21,199,600
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	554,000	554,000	0	0	0	0	554,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	60,960,000	60,960,000	22,450,000	0	22,450,000	36.83	38,510,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	61,300,000	61,300,000	48,174,000	0	48,174,000	78.59	13,126,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	155,814,000	155,814,000	82,424,400	0	82,424,400	52.9	73,389,600
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	27,449,000	9,934,000	1,743,520	0	1,743,520	17.55	8,190,480
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	27,449,000	9,934,000	1,743,520	0	1,743,520	17.55	8,190,480
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	8,400,000	8,400,000	407,671	0	407,671	4.85	7,992,329
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	24,000,000	16,591,542	0	16,591,542	69.13	7,408,458
522141	Belanja Sewa	65,027,000	65,027,000	25,000,000	0	25,000,000	38.45	40,027,000
522151	Belanja Jasa Profesi	13,200,000	3,072,000	0	0	0	0	3,072,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	165,627,000	155,499,000	41,999,213	0	41,999,213	27.01	113,499,787
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30,820,000	30,820,000	30,018,400	0	30,018,400	97.4	801,600
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60,750,000	60,750,000	15,784,200	0	15,784,200	25.98	44,965,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	91,570,000	91,570,000	45,802,600	0	45,802,600	50.02	45,767,400
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,426,000	92,464,000	1,540,000	0	1,540,000	1.67	90,924,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	47,426,000	92,464,000	1,540,000	0	1,540,000	1.67	90,924,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	487,886,000	505,281,000	173,509,733	0	173,509,733	34.34	331,771,267
	JUMLAH BELANJA	4,323,036,000	4,849,203,000	2,452,553,939	3,885,335	2,448,668,604	50.5	2,400,534,396

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KOTA TEBING TINGGI 656066

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 9:18 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	53,480,359	(53,480,359)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	53,480,359	(53,480,359)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	53,480,359	(53,480,359)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,849,203,000	2,448,668,604	(2,400,534,396)	50	4,406,836,000	2,425,651,466	1,981,184,534	55
1. Belanja Pegawai	4,343,922,000	2,275,158,871	(2,068,763,129)	52	3,338,922,000	1,599,969,125	1,738,952,875	48
2. Belanja Barang	505,281,000	173,509,733	(331,771,267)	34	1,031,950,000	825,682,341	206,267,659	80
3. Belanja Modal	0	0	0	0	35,964,000	0	35,964,000	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KOTA TEBING TINGGI 656066

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 9:18 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,849,203,000	2,448,668,604	(2,400,534,396)	50	4,406,836,000	2,425,651,466	1,981,184,534	55
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

TEBING TINGGI, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAHARUDDIN, S.SOS, MM
NIP 197003051994021001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (656066) KPU KOTA TEBING TINGGI

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 9:19 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,448,668,604
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	525,479,820	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,158	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	28,839,928	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	7,273,308	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	27,360,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	34,140,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6,422,177	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	23,608,920	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	63,844,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,835,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	476,466,900	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	259,054,841	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,860	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,213,292	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,962,462	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	17,010,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,864,810	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	38,751,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	11,040,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	497,679,559	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	226,186,171	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	11,800,400	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22,450,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	48,174,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,743,520	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	407,671	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	16,591,542	0
3.0	522141	Belanja Sewa	25,000,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30,018,400	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,784,200	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,540,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	300
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,885,035
JUMLAH			2,452,553,939	2,452,553,939

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Eselon I	: (01) Sekretariat Jenderal
Wilayah	: Sumatera Utara
Satuan Kerja	: KPU Kota Tebing Tinggi
No. Dokumen	: 001/JP/656066/2026 002/JP/656066/2026
Tanggal	: 30 Juni 2026
Tahun Anggaran	: 2026
Keterangan	: Jurnal Balik atas Belanja Yang Masih Harus Dibayar Per 31 Desember 2025

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Piutang Jangka Panjang
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Piutang Jangka Pendek
☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Transfer Masuk
☐	Penyisihan Piutang	☐	Transfer Keluar
☐	Penghapusan Piutang	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyusutan Aset	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Uang Muka Belanja
☐	Persediaan	☐	Perolehan Aset
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Peralatan Mesin yang belum diregister
☐	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Lainnya.....

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	Kode Akun	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	2.765.257	
	K	522112	Belanja Langganan Telepon		2.765.257
2	D	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar	122.476	
	K	522111	Belanja Langganan Listrik		122.476

Uraian:

1. Jurnal Balik atas Pembayaran Telephon/Indihome bulan Desember 2025
2. Jurnal Balik Atas Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Desember 2025

Disetujui Oleh:

Petugas Verifikasi/Akuntansi

Dian Husri Hurasan

Nip. 198103022009022004

Disetujui Oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran,

Naharuddin, S.Sos, M.M

Nip. 197003051994021001

Dibuat/Direkam

Operator SAKTI

Heri Septian

Nip. 198509302012121003

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Eselon I	: (01) Sekretariat Jenderal
Wilayah	: Sumatera Utara
Satuan Kerja	: KPU Kota Tebing Tinggi
No. Dokumen	: 003/JP/656066/2026 004/JP/656066/2026 005/JP/656066/2026
Tanggal	: 30 Juni 2026
Tahun Anggaran	: 2026
Keterangan	: Jurnal Balik atas Belanja Dibayar Di Muka

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Piutang Jangka Panjang
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☒	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Piutang Jangka Pendek
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Transfer Masuk
☐	Penyisihan Piutang	☐	Transfer Keluar
☐	Penghapusan Piutang	☐	Koreksi Beban Aset
☐	Penyusutan Aset	☐	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Kas Lainnya di BLU
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Uang Muka Belanja
☐	Persediaan	☐	Perolehan Aset
☐	Koreksi Antar Beban	☐	Koreksi Piutang/Utang
☐	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Peralatan Mesin yang belum diregister
☐	Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐	Lainnya.....

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	Kode Akun	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522141	Belanja Barang yang dibayar dimuka (Prepaid)	16.666.668	
	K	114112	Belanja Sewa		16.666.668
2	D	114112	Belanja Sewa	2.083.333	
	K	522141	Belanja Barang yang dibayar dimuka (Prepaid)		2.083.333
3	D	114112	Belanja Sewa	2.083.333	
	K	522141	Belanja Barang yang dibayar dimuka (Prepaid)		2.083.333

Uraian:

- | |
|--|
| 1. Jurnal Prepaid Sewa Gudang Rutin Tahun 2026 dengan sisa manfaat 8 Bulan untuk bulan Mei s/d Desember 2026 |
| 2. Jurnal Balik atas Prepaid Sewa Gudang Rutin Tahun 2026 |
| 3. Jurnal Balik atas Prepaid Sewa Gudang Rutin Tahun 2026 |

Disetujui Oleh:
Petugas Verifikasi Akuntansi.

Dian Husri Hurasan
Nip. 198103022009022004

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran,

Naharuddin, S.Sos, M.M
Nip. 197003051994021001

Dibuat/Direkam Oleh:
Operator SAKTI

Heri Septian
Nip. 198509302012121003